

# **PENERAPAN PIDANA MINIMUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA SEBAGAI AKIBAT KEGAGALAN PROSES DIVERSI**

**CHANDRA CITRA KESUMA**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaturan pidana minimum bagi anak pelaku tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta bertujuan untuk mengetahui dan memahami secara mendalam proses penegakan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana narkotika sejak tahap penyidikan hingga putusan pengadilan. Dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat penerapan diversifikasi bagi anak pelaku tindak pidana. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan, oleh John Rawls, yang menyebutkan bahwa setiap orang dapat memiliki konsep keadilan yang berbeda dengan konsep orang lain. Di samping itu juga digunakan teori kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan penanggulangan kejahatan. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana asas-asas hukum, penemuan *hukum in concreto* bagi suatu perkara tertentu sinkronisasi vertikal atau horizontal dan sistematis hukum diterapkan yang bertumpu pada data sekunder. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan pidana minimum bagi anak pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai ketentuan Pasal 6 huruf a, Diversifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada dasarnya bertumpu pada kesepakatan/perjanjian perdamaian antara korban dan/atau keluarga anak korban dengan anak dan keluarga anak. Proses penegakan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana narkotika proses diversifikasi terhadap anak juga dapat dilakukan dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Dengan menempatkan kedua SEMA ini sebagai bagian dari proses diversifikasi juga tepat karena umumnya tindak pidana narkotika diancam dengan pidana lebih dari 7 tahun penjara kecuali tindak pidana yang diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika karena itu perawatan baik medis dan sosial terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika dapat lebih dioptimalkan. Faktor yang menyebabkan kegagalan dalam penerapan diversifikasi anak yang melakukan tindak pidana narkotika pada tahap penyidikan yaitu penyidik tidak memiliki pengalaman dan tidak memahami tentang hukuman pidana anak serta penyidik belum memahami tentang diversifikasi anak pelaku kejahatan narkotika yang diatur dalam sistem pengadilan pidana anak.

**MINIMUM CRIMINAL APPLICATION FOR CHILDREN OF ACTION OF  
CRIMINAL DRUG DRUG AS DUE TO FAILURE OF THE  
DIVERSION PROCESS**

**CHANDRA CITRA KESUMA**

**ABSTRACT**

*This research was conducted to find out the minimum criminal regulation for children of perpetrators of narcotics crimes in Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System of Children and aims to know and understand in depth the law enforcement process for children who commit narcotics crime from the investigation stage to the verdict court. And find out the factors that become obstacles to the application of diversion for child offenders.*

*The theory used in this study is the theory of justice, by John Rawls, which states that everyone can have a concept of justice that is different from the concept of others. In addition, policy theories are also used relating to crime prevention policies.*

*The research method used in this thesis is normative juridical research. This normative juridical study is used to determine the extent of legal principles, the discovery of laws in concerto for a particular case, vertical or horizontal synchronization and systematic law is applied which relies on secondary data.*

*The results of this study conclude that the minimum criminal regulation for children of narcotics criminals is based on the Child Criminal Justice System Act in accordance with Article 6 letter a, Diversity regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System basically relies on an agreement / peace agreement between the victim and / or family of the victim's child with the child and family of the child. The process of law enforcement for children who commit narcotics crimes in the diversion process against children can also be carried out by referring to the Supreme Court Circular Letter Number 4 of 2010 concerning Abuse Placement, Abuse Victims, and Narcotics Addicts to Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation and Supreme Court Circular (SEMA) Number 3 of 2011 concerning the Placement of Victims of Narcotics Abusers in the Institute for Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation. By placing these two SEMAs as part of the diversion process, it is also appropriate because generally narcotics crimes are threatened with criminal penalties of more than 7 years in prison except for criminal acts stipulated in Article 127 of Law Number 39 of 2009 concerning Narcotics because they are both medical and social children involved in narcotics crimes can be optimized. Factors that cause failure in the application of diversion of children who commit narcotics crimes at the investigation stage are investigators have no experience and do not understand about criminal penalties of children and investigators do not understand the diversion of children who are perpetrators of narcotics crimes regulated in the juvenile criminal court system.*